

**PERAN LSM GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA DALAM
PENGAWASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pendidikan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan



Oleh :

Sri Rahayu

NIM 1906701

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN DAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2022**

Sri Rahayu, 2022

*PERAN LSM GERAKAN BAWAH INDONESIA DALAM PENGAWASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**PERAN LSM GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA DALAM
PENGAWASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

Oleh

Sri Rahayu, S.Pd

2018 Universitas Pasundan Bandung

Sebuah Tesis yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Pendidikan (M.Pd) Pendidikan Kewarganegaraan

© Sri Rahayu 2022

Universitas Pendidikan Indonesia

2022

Hak Cipta dilindungi undang- undang
Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak ulang,
di fotocopy, atau cara lainya tanpa izin dari penulis.

Sri Rahayu, 2022

*PERAN LSM GERAKAN BAWAH INDONESIA DALAM PENGAWASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**LEMBAR PENGESAHAN
TESIS**

**PERAN LSM GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA DALAM
PENGAWASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

SRI RAHAYU

1906701

**Disetujui Dan Disahkan oleh
Pembimbing I,**



Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H., M.H., M.Si.

NIP 1969 09 29 1994 02 1001

Mengetahui,

**Ketua Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Program Magister dan Doktor
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia**



Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H., M.H., M.Si.

NIP 1969 09 29 1994 02 1001

Tesis telah diuji tahap I pada

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Desember 2021

Tempat : Via Zoom

Penguji Tesis

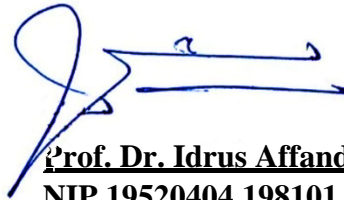
Penguji I:



Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H., M.H., M.Si.

NIP 1969 09 29 1994 02 1001

Penguji II:



Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H.

NIP 19520404 198101 1 002

Penguji III:



Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.

NIP. 19600515 198803 1 002

Penguji IV:



Dr. Leni Anggraeni, M.Pd.

NIP 19840222 200912 2 014

ABSTRAK

Judul : Peran LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Dalam Pengawasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

Nama : Sri Rahayu (1906701)

Korupsi masih menjadi masalah yang krusial bagi bangsa Indonesia. Masih banyak kasus korupsi yang terjadi di bangsa ini, mulai dari pemerintahan daerah sampai pemerintah pusat maupun swasta. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari segala elemen masyarakat untuk dapat mewujudkan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Namun yang menjadi masalah masih sedikit yang memahami bahwa sebagai warga Negara memiliki kewajiban dalam pengawasan korupsi baik secara individu maupun kelompok. Yang menjadi fokus utama penelitian ini ialah bagaimana peran dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia dalam pengawasan korupsi ditinjau dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini dilaksanakan di LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia dan kepada dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai ahli, dengan menggunakan pendekatan Kualitatif metode *naturalistic inquiry*. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik observasi, wawancara, analisis dokumentasi serta analisis literatur. Dengan partisipan penelitian yaitu dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pasundan Bandung, dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan, serta pengurus LSM Gerakan Masyarakat bawah Indonesia. Hasil penelitian ini ialah mencakup: 1) Partisipasi warga negara dalam pengawasan korupsi baik secara individu ataupun kelompok dilihat dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bentuk dari sikap bela negara dan aktivitas sosial kultural, kemudian LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia sebagai sebuah organisasi merupakan bagian dari *civil society*. 2) Internalisasi nilai-nilai antikorupsi yang dilakukan LSM Gerakan Masyarakat bawah Indonesia dilakukan berupa pendidikan antikorupsi. 3) Yang menjadi faktor pendukung LSM Gerakan Masyarakat bawah Indonesia melakukan pengawasan korupsi ialah mengacu kepada beberapa Undang-Undang yang menyatakan bahwa sebagai warga negara wajib ikut serta dalam pengawasan korupsi. Faktor penghambat LSM Gerakan Masyarakat bawah Indonesia ialah sebuah system dan tidak transparansi lembaga terkait.

Kata Kunci: Peran LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, Pengawasan Korupsi, Pendidikan Kewarganegaraan

ABSTRACT

Title: The Role of the Indonesian Lower Society Movement NGO in Supervision of Corruption Crimes from the Perspective of Citizenship Education

Name: Sri Rahayu (1906701)

Corruption is still a crucial problem for the Indonesian people. There are still many cases of corruption that occur in this nation, ranging from local government to the central government and private sector. This is the duty and responsibility of all elements of society to be able to create a country that is free from corruption, collusion and, nepotism. However, the problem is that few people understand that as citizens, they must monitor corruption, both individually and in groups. The main focus of this research is how the role of the NGO, the Indonesian Lower Society Movement in controlling corruption is seen from the perspective of Citizenship Education. This research was carried out at the NGO of the Indonesian Lower Society Movement and to lecturers of Citizenship Education courses as experts, using a qualitative approach. Naturalistic inquiry. For data collection in this study using observation techniques, interviews, documentation analysis, and literature analysis. The research participants, namely lecturers of Citizenship Education at Pasundan University, Bandung, lecturers in Citizenship Education at Ahmad Dahlan University, and management of the Indonesian Lower Society Movement NGO. The results of this study are to include: 1) The participation of citizens in corruption controls either individual or group from the perspective of Citizenship Education is a form of an attitude of defending the country and social activities cultural, then the NGO Society Movement Under Indonesia as an organization is a part of civil society 2) Internalization of anti-corruption values carried out by the NGO, the Indonesian People's Movement, is carried out in the form of anti-corruption education. 3) The supporting faktor for the Indonesian Community Movement NGO to monitor corruption is that it refers to several laws which state that as citizens it is obligatory to participate in corruption surveillance. The inhibiting faktor for the NGO under the Indonesian Community Movement is the system and the lack of transparency of the relevant institutions.

Keywords: The Role of the Indonesian Lower Society Movement NGO, Corruption Control, Citizenship Education

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1) Manfaat dari Segi Teori	6
2) Manfaat dari Segi Praktik	7
3) Manfaat dari Segi Kebijakan	7
4) Manfaat dari Segi Aksi Sosial dan Isu	7
1.5 Struktur Organisasi Tesis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	9
2.1.1 Pengertian Korupsi.....	9
2.1.2 Landasan Hukum Tindak Pidana Korupsi	11
2.1.3 Faktor Penyebab Korupsi.....	12
2.1.4 Jenis-Jenis Korupsi.....	13
2.1.5 Upaya Pencegahan Korupsi	14
2.1.6 Praktik Pengawasan Tindak Pidana Korupsi di Berbagai Negara	17
2.1.7 Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Korupsi	20
2.2. Tinjauan Tentang Pendidikan Antikorupsi	23

2.2.1	Pengertian Pendidikan Antikorupsi.....	23
2.2.2	Landasan Hukum Pendidikan Antikorupsi	27
2.2.3	Filsafat Antikorupsi.....	28
2.2.4	Nilai-Nilai Antikorupsi	33
2.2.5	Prinsip-Prinsip Antikorupsi.....	35
2.2.6	Hubungan Pendidikan Antikorupsi dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	36
2.3	Tinjauan Tentang LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia	39
2.3.1	Visi dan Misi LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia	39
2.3.2	Selayang Pandang Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia	40
2.3.3	Struktur Organisasi Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia.....	42
2.3.4	Sasaran Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia	42
2.4	Tinjauan Tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).....	43
2.4.1	Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	43
2.4.2	Masyarakat Sipil (<i>Civil Society</i>).....	45
2.4.3	Bela Negara.....	47
2.5	Kerangka Pemikiran.....	49
2.6	Penelitian Yang Relevan.....	49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Pendekatan Penelitian	54
3.2	Metode Penelitian	55
3.3	Partisipan dan Tempat Penelitian.....	56
3.3.1	Partisipan.....	56
3.3.2	Tempat Penelitian.....	56
3.4	Teknik Pengambilan Sampel	56
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.5.1	Observasi.....	58
3.5.2	Wawancara.....	58
3.5.3	Studi Dokumentasi	59
3.6	Analisi Data	59
3.6.1	Reduksi Data	60
3.6.2	Display Data.....	61
3.6.3	Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan	61

3.6.4	Triangulasi.....	61
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum LSM Gerakan Masyarakat bawah Indonesia (GMBI)	63
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	65
4.2.1	Deskripsi Hasil Wawancara	66
4.2.2	Deskripsi Hasil Observasi	96
4.2.3	Deskripsi Hasil Dokumentasi.....	104
4.2.4	Triangulasi	110
4.3	Hasil dan Pembahasan	121
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI		
5.1	Simpulan	142
5.2	Saran	143
DAFTAR PUSTAKA		145
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

a) Tabel 2.1.7.1 Keterlibatan Masyarakat dalam PPM	22
b) Tabel 4.2.1.1 Kasus Korupsi di Jawa Barat	91
c) Tabel 4.2.4.1 Triangulasi	97
d) Tabel 4.3.1 Hasil dan Pembahasan	138

DAFTAR GAMBAR

a) Gambar 2.1.2.1 Segitiga Kecurangan	12
b) Gambar 2.1.6.1 Strategi Negara Slowakia	18
c) Gambar 2.2.1.1. Pengaruh ATB Terhadap Intensi Perilaku Anti-Korupsi	25
d) Gambar 2.2.1.2 Pengaruh SN Terhadap Intensi Perilaku Anti-Korupsi ...	25
e) Gambar 2.2.1.3 Pengaruh PCB Terhadap Intensi Perilaku Anti-Korupsi	25
f) Gambar 2.2.1.4 <i>Theory of Planned Behavior</i>	26
g) Gambar 2.1.6.1 Hasil yang Diharapkan dari Kompetensi Pengetahuan ...	38
h) Gambar 2.1.6.2 Hasil yang Diharapkan dari Kompetensi Sikap	38
i) Gambar 2.3.3.1 Struktur Organisasi LSM GMBI	42
j) Gambar 2.5.1 Kerangka Pemikiran	49
k) Gambar 3.6.1 Komponen dalam Analisis Data (<i>flow model</i>)	60
l) Gambar 3.6.2 Komponen dalam Analisis Data (<i>interactive model</i>)	60
m) Gambar 3.6.3 Triangulasi “Teknik” Pengumpulan Data (Variasi Cara Pada Sumber Yang Sama)	62
n) Gambar 3.6.4 Triangulasi “Teknik” Pengumpulan Data (Satu Teknik Pengumpulan Data dengan Variasi Sumber Data A,B,C)	62
o) Gambar 4.1.1 <i>Core System</i> LSM GMBI	65
p) Gambar 4.2.3.1 Kegiatan Talkshow LSM GMBI	104
q) Gambar 4.2.3.2 Kegiatan Implementasi Bela Negara dalam Konsep Jaga Lembur Kota Bandung	105
r) Gambar 4.2.3.3 Kegiatan Diskusi Kebangsaan	106
s) Gambar 4.2.3.4 Buku Panduan LSM GMBI	107
t) Gambar 4.2.3.5 Aksi Demo LSM GMBI	108
u) Gambar 4.2.3.7 Aksi Depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.....	109
v) Gambar 4.2.3.7 Aksi Gerakan Moral di Kejaksaan Agung & KPK	11

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adwirman. (2014). *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Anas, Z. (2018). *Inseri Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran PPKn Untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
- Andrianto, T. T. (2015). *Paradigma Baru Bela Negara (Implementasi dan Pengembangan di Era Globalisasi)*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Ariawan, I. G. (2015). *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Bali: Universitas Udayana.
- Arikunto. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Metode Praktik*. Jakarta: Rineka Karya.
- Armawi, A. (2018). *WIRA Media Informasi Kementerian Pertahanan Edisi Khusus Ketahanan Nasional dan Bela Negara*. Jakarta: Puskom Publik Kemhan.
- Biklen, R. B. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston, London: Allyn and Bacon.
- Budimansyah, D., & Karim Suryadi. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Cogan, J. J. (1999). *Developing The Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CICED.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. London: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edwirman. (2014). *Buku Ajar dan Pendidikan Budaya Antikorupsi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Antikorupsi*. Semarang: Ombak (Anggota IKAPI).
- Kesuma. (2008). *Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi*. Bandung: Pustaka Aulia Press.

- Klitgaard, R. (2005). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Korupsi, K. P. (2015). *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepujian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lincoln, Y., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. California: Sage.
- Puspito, N. (2011). *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Sapriya. (2011). *Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sulisworo. (2013). *Peningkatan Civic Society Untuk kemajuan IPTEK dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Cetta Media (Kelompok Penerbit Makmur).
- Surono, A., & Handayani, M. N. (2018). *Pendidikan Budaya Antikorupsi*. Depok: CV Daya Media Utama.
- Suryanto. (2018). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Trionovani, E. (2016). *Modul Bahan Ajar Cetak Garmasi: Pengetahuan Budaya Antikorupsi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Ubaedillah. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila Demokrasi Dan Korupsi*. Jakarta: Media Group.
- Wahab, A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta CV.
- Winataputra. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan; Refleksi Historis Epistemologis dan Rekonstruksi Untuk Masa Depan*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Wattimena, R. (2012). *Filsafat Anti-Korupsi*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Jurnal, Disertasi, Tesis dan Skripsi

- Aji, P. C. (2010). Peran Pkn Dalam Membentuk Karakter Kewarganegaraan Melalui Pendekatan Berbasis Nilai Di Perguruan Tinggi . *Surakarta : Laboratorium PPKn UNS & UNS Press, 2010*.

- Ali, M. (2017). Empowerment of Anti-Corruption NGOs. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 14, Issue 4 (December) ISSN 2289-1552.
- Ardisasmita, M. (2006). Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik. *Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Asfar, M. (2001). Wacana Masyarakat Madani (Civil Society): Relevansi Untuk Kasus Indonesia. *Kebudayaan dan Politik*, Th XIV, No 1, 49-60.
- Barati, A., & Dkk. (2017). The Role of Specialized Civil Society in Challenge Corruption with Glance to I.R.I. *Journal of Public Administration and Governance*. 2017, Vol. 7, No. 3 ISSN 2161-7104.
- Bhakti, S., & Djauhari. (2017). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2 Juni 2017.
- Bunga, M., Maroa, M., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform Volume 15, Nomor 1*.
- Carr, I., & Outhwaite. (2011). The Role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Combating Corruption: Theory and Practice. *Suffolk University Law Review Volume XLIV 2011 Number 3 10/8/2011 6:16 PM*.
- Epakartika, Nugraha M, R., & Budiono, A. (2020). Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam . *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (2-2), 93-106 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X .
- Gunanjar, G., Nurhayati, S., Mujiyanto, & Rachman, Y. (2019). Pengawasan Dengan Partisipasi Masyarakat dan Penerapannya di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengawasan BPKP. *Jurnal Pengawasan* Vol. 1, No. 1.
- Gusmadi, S. (2018). Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan . *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* Vol. 9, no. 1 (2018), pp. 105-117. , 105-117.
- Hakim. (2012). Model integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(2), 141–156. , 141-156.
- Hermanto, & Danial. (2012). Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguat Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, Volume 19, Nomor 2, Oktober 2012.

- Indrawan, J., & Aji, M. (2018). Pendidikan Bela Negara sebagai Mata Kuliah di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Desember 2018, Volume 8 Nomor 3*.
- Latuconsina, N. (2013). Perkembangan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia. *Populis, Volume 7 No. 2 Oktober 2013*.
- Lestari, W. (2019). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Mahasiswa Dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) Dalam Upaya Menunjang Good Governance Di Kabupaten Tasikmalaya. *Tesis Universitas Siliwangi*.
- Muchsin, S. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Et Societatis Vol. VI/No. 9/Nov/2018*.
- Noe, W., Hasmawati, & Rumkel, N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Karakter Menurut Pemikiran Udin S. Winataputra. *UCEJ, Vol. 6 No. 1, ISSN : 2541-6693, 40-57*.
- Patrick, J., & Vontz, T. (2001). Components of Education for Democratic Citizenship in the Preparation of Social Studies Teachers” dalam John J. Patrick dan Robert S. Learning, Principles and Practices of Democracy in the Education of Social Studies Teachers. *Vol. 1, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, ERIC Clearinghouse for International Civic Education and Civitas, 39-64*.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014*.
- Rusdiana, E., & Hikmah, N. (2020). Implementasi Gerakan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pada Lembaga Antikorupsi di Provinsi Jawa Timur. *Perspektif Hukum, Vol. 20 No. 1, 20-42*.
- Sapriya. (2007). Perspektif Pemikiran Pakar Tentang Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa. *Disertasi SPs UPI Bandung*.
- Siregar, D. (2018). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan Metode Sosiodrama Terhadap Kepedulian Sosial Siswa Kelas V Di Sd Negeri 060898 Medan. *Elementary School Journal Volume 8 NO. 1 JUNI 2018, 103-109*.
- Sofwan, E. (2017). Penguatan Civil Society Berdasarkan Hak Asasi Manusia DI Negara Hukum Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 Nomor 2*.

- Somawinata, R. (2017). Peran Sosialisasi Politik Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Mahasiswa. *Skripsi FKIP Universitas Pasundan Bandung*, 1-71.
- Supandi, A., & Vernia, D. (2015). Peran Pendidikan Antikorupsi Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Nasional Yang Bersih Dari Korupsi . *Research and Development Journal Of Education Vol. 1 No. 2* .
- Sutrisno. (2017). Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn Berbasis Project Citizen di Sekolah Menengah Atas . *Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017* , 166-175.
- Wahid, M. (2014). Fungsi Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . *Skripsi Universitas Negeri Gorontalo*.
- Waluyo, B. (2018). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2*, 169-182.
- Winataputra. (2001). Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi. *Disertasi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung*.
- Wiyono, S. (2020). Konstruksi dan Transformasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Disertasi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kemudian dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 jo. Perpu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
- Undang-Undang NRI 1945 amandemen keempat tahun 2002
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah

Sumber Lainnya

Darmawan, C. (2020, Agustus 25). *Bela Negara Vs Wajib Militer di Kampus*.

Retrieved from Media Indonesia:

<https://mediaindonesia.com/read/detail/339131-bela-negara-vs-wajib-militer-di-kampus>

Korupsi, K. P. (2021, Oktober 1). *Statistik Penindakan*. Retrieved from Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik>

Talib. (2013, April 18). *Buku Panduan Aktivitas Anggota LSM GMBI*. Retrieved from GMBI Pusat: <https://gmbipusat.wordpress.com/2013/04/18/buku-panduan-aktivis-anggota-lsm-gmbi/>

Talib. (2013, April 18). *Buku Panduan Budaya Org. LSM GMBI*. Retrieved from GMBI Pusat: <https://gmbipusat.wordpress.com/2013/04/18/buku-panduan-budaya-org-lsm-gmbi/>